

# PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN MEMPURA

Laras Sentia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru  
E-mail : larassentia12@gmail.com

diterima: 16/1/2025; direvisi: 12/2/2025; diterbitkan: 31/3/2025

**Abstract:** This study investigates the impact of the Whistleblowing System, Good Government Governance, and Internal Control on the prevention of fraud in managing village funds in Mempura District. The research population comprised 35 individuals, including village heads, secretaries, treasurers, financial officers, and administrative staff. Using a saturated sampling technique, all 35 were selected as respondents. The research employed quantitative secondary data collection involved administering questionnaires to selected participants. Following this, a multiple linear regression was carried out through SPSS version 26. Evidence from the study supports the conclusion that the Whistleblowing System, effective governance, and strong internal control systems are all significant factors in reducing fraud risk in the management of village funds, both separately and simultaneously.

**Keywords:** *Whistleblowing System, Good Government Governance, Internal Control Fraud in Village Fund Management in Mempura District*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dana dalam upaya merealisasikan agenda pembangunan, desa memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dari tingkat desa sebagai basis pembangunan nasional. Meskipun bertujuan positif, pelaksanaannya sering kali diwarnai oleh tantangan, salah satunya adalah adanya praktik kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta mencemarkan reputasi pemerintah daerah dan mengikis kepercayaan publik (Lestari & Ayu, 2021).

Beberapa faktor yang diyakini dapat membantu menekan potensi terjadinya kecurangan antara lain dengan upaya pencegahan terhadap praktik kecurangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (GGG), serta peningkatan pengendalian internal. *Whistleblowing system* memberi ruang

bagi pihak internal untuk melaporkan tindakan tidak etis atau penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, *good government governance* menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Di sisi lain, pengendalian internal diperlukan agar seluruh kebijakan dan prosedur dapat berjalan sesuai aturan guna meminimalkan risiko penyimpangan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Kuswati, 2023).

Pengelolaan keuangan desa sendiri yang digunakan berasal dari berbagai sumber, termasuk ADD, pajak dan retribusi daerah, serta berbagai bentuk bantuan. dari pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta pendapatan asli desa. Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dana desa tergolong sebagai transfer ke daerah., yang merupakan keseluruhan arus masuk dan keluar anggaran pemerintah daerah. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian target

pembangunan dalam satu tahun anggaran, dan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah (Kamilah, F., & Putri, 2023).

Seiring dengan meningkatnya jumlah alokasi dana desa setiap tahun, seperti yang terjadi di Kecamatan Mempura, tantangan dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelola keuangan desa menjadi semakin kompleks. Kenaikan dan penurunan anggaran pada tiap desa menunjukkan dinamika perencanaan dan evaluasi yang belum sepenuhnya konsisten. Dalam situasi ini, penerapan sistem pencegahan kecurangan menjadi sangat penting sebagai upaya untuk menjamin pemanfaatan dana pemerintah berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan alokasinya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa tidak terlepas dari risiko penyimpangan dan praktik kecurangan. Situasi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, kurangnya integritas pengelola keuangan desa, serta tidak optimalnya tata kelola pemerintahan desa. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan objek wisata di Desa Sungai Mempura yang sempat mangkrak dan kemudian kembali dibiayai, namun tetap tidak menunjukkan hasil memuaskan. Dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut memperkuat indikasi lemahnya kontrol dan transparansi dalam pelaksanaannya

Pembangunan taman mengalami jeda selama tujuh tahun akibat kegagalan dalam mencapai target, meskipun telah dikururkan dana sebesar Rp1,79 miliar dari pemerintah daerah kepada pihak kecamatan dan desa sebagai penanggung jawab. Upaya pembangunan kembali dilakukan pada tahun 2021 dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Namun demikian, proses ini kembali menimbulkan persoalan, karena muncul laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyelewengan dana. Kecurigaan muncul

akibat penggunaan material yang tidak sesuai standar yang seharusnya diterapkan dalam pembangunan. Secara keseluruhan, proyek ini telah menyerap anggaran sekitar Rp3 miliar yang dialokasikan kepada pemerintah kecamatan dan desa (Suryowati, 2024).

Penelitian ini penting diteliti karena masih tingginya kerentanan terhadap kecurangan di tingkat desa, serta perlunya perbaikan sistem pengawasan yang berbasis pada partisipasi dan integritas, maka penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan sebagai bagian dari kontribusi ilmiah terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berdaya saing.

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori *fraud triangle* menyatakan bahwa kecurangan timbul akibat kombinasi dari tekanan, kesempatan yang tersedia, dan adanya pembenaran dari pihak pelaku. Tekanan timbul dari kebutuhan atau dorongan pribadi seperti masalah keuangan, gaya hidup berlebihan, atau tuntutan target kerja. Ketika sistem pengawasan dan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, hal ini membuka celah bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini, rasionalisasi menjadi mekanisme pembelaan diri yang digunakan pelaku untuk menilai bahwa perbuatannya masih dapat dibenarkan atau dianggap wajar (Rahayu, 2024).

Menurut Wicaksono & Prabowo, (2022), *Whistleblowing system* berkaitan dengan unsur kesempatan. Ketika sistem pelaporan pelanggaran berjalan efektif, maka kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan akan menurun karena ada pengawasan sosial dari dalam organisasi. Pelaku kecurangan akan berpikir dua kali karena tahu tindakannya bisa dilaporkan. *Good government governance* berhubungan dengan rasionalisasi.

Pemerintahan yang dikelola secara transparan dan akuntabel mendorong terciptanya budaya organisasi yang

berintegritas, yang pada akhirnya menutup celah bagi tindakan kecurangan untuk dibenarkan. Penanaman nilai-nilai etika secara konsisten akan melemahkan alasan-alasan rasionalisasi dari pelaku. Lebih lanjut, pengendalian internal sangat memengaruhi tingkat kesempatan—semakin kuat sistem pengendalian tersebut, semakin kecil kemungkinan kecurangan terjadi karena seluruh kegiatan diawasi dan terdokumentasi dengan tertata.

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan fokus pada data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta observasi, karena seluruh data penelitian dihimpun melalui kuesioner yang disampaikan kepada kantor pemerintahan desa se-kecamatan Mempura. Pertanyaan dalam kuesioner disusun untuk merepresentasikan masing-masing faktor yang diteliti. Teknik Instrumen pengukuran menggunakan skala Likert dengan lima level jawaban (Sugiyono, 2018:152). Skoring terhadap responden dilakukan dalam kisaran nilai 1 hingga 5, mengikuti kriteria selengkapnya:

**Tabel 1 Skor Kuesioner**

Skor	Keterangan
5	Sangat setuju
4	Netral
3	Kurang setuju
2	Tidak setuju
1	Sangat tidak setuju

Sumber : Data Diolah peneliti, (2025)

Adapun populasi terdiri dari 35 orang yang di peroleh dari 5 responden di 7 kantor desa se-kecamatan Mempura. Peneliti menerapkan teknik teknik sampling jenuh untuk pemilihan sampel. Teknik tersebut digunakan dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil. dengan ketentuan kriteria yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata

usaha dan umum, dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *Whistleblowing System*, *Good government governance* dan Pengendalian Internal. *Whistleblowing System* ini memungkinkan seseorang untuk melaporkan tindakan yang termasuk tindakan ilegal dan dapat menyebabkan kerugian bagi institusi yang bersangkutan. (Wardah et al., 2022). Menurut Dewi & Padnyawati, (2022), indikator pada *whistleblowing system* dapat diterapkan dengan Persepsi seperti 1. mengenai penerapan *whistleblowing*, 2. Menganalisis upaya pencegahan kecurangan dengan *whistleblowing*, 3. Sistem pelaporan *whistleblowing*, 4. Perlindungan terhadap *whistleblower*.

GGG merupakan pemerintahan yang teguh, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan fungsi secara efektif dan efisien, hanya dapat tercapai melalui kolaborasi konstruktif antara organisasi negara, sektor privat, dan elemen masyarakat (Nadila, 2021).

Adapun indikator yang dapat dilakukan menurut Dewi & Padnyawati, (2022), yaitu 1. Transparansi. 2. Partisipasi. 3. Akuntabilitas. 4. Aturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Febiola & Sari, (2024), Pengendalian internal merupakan himpunan pedoman dan prosedur yang telah dirumuskan guna mengatur serta mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi, sehingga proses operasional berjalan optimal dan tujuan organisasi dapat diwujudkan secara efektif. Adapun indikator yang dapat dilakukan menurut Dewi & Padnyawati, (2022), dapat diterapkan dengan pengukuran 1. lingkungan pengendalian, 2. penilaian resiko, 3. aktivitas pengendalian, 4. informasi komunikasi dan 5. Pemantauan.

Dalam studi ini, variabel terikat yang digunakan adalah kecurangan Pengelolaan dana desa. Menurut Bramasto &

Anggadini, (2022), meminimalisir kecurangan yakni suatu segala bentuk usaha untuk mencegah atau menghindari tindakan kecurangan dari pegawai maupun karyawan diperlukan agar organisasi atau instansi tidak mengalami kerugian. Pencegahan ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional, mendukung pencapaian visi perusahaan, dan memperkuat citra institusi di mata publik.

Indikator yang dapat digunakan pada variabel terikat tersebut yakni menurut Dewi & Padnyawati, (2022), 1. penerapan kebijakan anti-*fraud*, 2. prosedur penanganan pencegahan *fraud*, 3. teknik pengendalian dalam *fraud*, 4. kepekaan terhadap *fraud*. Statistik deskriptif dijelaskan dengan menggunakan ukuran statistik meliputi perhitungan rata-rata, standar deviasi, serta batas nilai tertinggi dan terendah (Ghozali, 2021:19).

Uji validitas mempertunjukkan sebuah pernyataan dalam kuesioner yang akan mencerminkan ingin diukur, dilakukan pengujian validitas. Pengujian ini melibatkan analisis korelasi antara nilai setiap butir-butir pernyataan dengan jumlah skor kumulatif yang berasal dari seluruh instrumen pernyataan.. Dalam pengujian validitas, suatu item dikategorikan valid apabila item dinyatakan sah ketika nilai  $r$  hitung melampaui nilai  $r$  tabel. Jika tidak, item tersebut dianggap invalid dan, khususnya bagi item dengan nilai  $r$  hitung paling rendah, akan dihapus dari kuesioner dan proses validasi akan dilanjutkan hingga seluruh item memenuhi syarat validitas (Ghozali, 2018:51).

Untuk menilai konsistensi suatu instrumen, uji reliabilitas dilakukan dengan memanfaatkan analisis statistik *Cronbach's Alpha* dengan tingkat signifikansi 0,05. Suatu instrumen dikategorikan reliabel ketika hasil pengujian menunjukkan koefisien alpha di atas 0,60. (Ghozali, 2018:161). Pengujian

normalitas bertujuan mengecek adanya residual pada model regresi berdistribusi normal. Pengujian dapat menggunakan *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Ketika titik-titik data tersebar mengikuti garis diagonal dan membentuk pola yang sesuai dengan arah garis, maka disimpulkan bahwa residual model regresi memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021:161).

Multikolinearitas diuji guna melihat keberadaan hubungan antar variabel independen itu dapat memengaruhi hasil estimasi dalam model regresi. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas adalah melalui nilai tolerance serta VIF. Model tersebut terbebas dari isu multikolinearitas ketika tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, sedangkan nilai tolerance dibawah 0,1 atau VIF melebihi 10 menandakan keberadaan multikolinearitas. (Ghozali, 2018:107).

Uji autokorelasi bertujuan menguji diuji untuk mengevaluasi kemungkinan adanya hubungan antara nilai residual saat ini dan nilai residual pada model regresi linier dapat mengidentifikasi autokorelasi dengan menganalisis apakah terdapat hubungan sistematis antara residual dari periode sebelumnya dengan periode saat ini, Uji *Durbin-Watson* (DW) sering dipilih sebagai metode yang berlaku, dengan aturan sebagai berikut:

1. Kurang dari -2 menunjukkan adanya terjadi korelasi positif antar residual pada suatu rangkaian waktu.
2. Apabila antara -2 hingga +2 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi.
3. Apabila diatas +2 menandakan terjadi korelasi negatif antar residual pada suatu rangkaian waktu.

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan mengevaluasi adanya variasi yang tidak konsisten pada residual dari setiap data pengamatan dalam model regresi.. Pola heteroskedastisitas bisa dikenali melalui

pengamatan grafik *scatter plot* seperti yang ditunjukkan berikut:

- a. Munculnya pola yang teratur seperti gelombang atau penyebaran titik yang mengembang lalu mengecil menjadi indikasi adanya heteroskedastisitas.
- b. Sebaliknya, apabila saat titik-titik persebaran data muncul secara acak dan merata di sekitar garis nol pada sumbu vertikal tanpa pola yang jelas, hal ini menunjukkan tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji F digunakan sebagai uji bersamaan pada secara keseluruhan untuk memeriksa apakah seluruh variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria yang ditentukan berdasarkan hasil uji yang diterapkan dalam analisis ini yaitu: pengaruh simultan dianggap signifikan jika nilai sig  $\alpha$  Kurang atau sama nilainya dengan 0,05, sedangkan nilai di atas 0,05 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Pengujian t memfokuskan pada pemeriksaan dampak setiap variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dalam kerangka analisis. Ketika nilai signifikansi probabilitas melebihi 0,05, hipotesis ditolak, menandakan ketiadaan pengaruh signifikan. Namun, apabila nilai tersebut di bawah 0,05, hipotesis tersebut diterima, yang mengindikasikan pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel dependen.

$R^2$  atau Penggunaan koefisien determinasi bertujuan untuk menilai tingkat variasi variabel yang menjadi output yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Untuk hasil yang lebih objektif dan bebas dari bias, nilai menggunakan nilai *R square* dimana nilai *R square* lebih direkomendasikan (Ghozali, 2018:97).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	32	2	5	16.78	1.845
X2	32	1	5	17.78	2.196
X3	32	1	5	19.53	2.079
Y	32	1	5	20.13	1.862
Valid N (listwise)	32				

Sumber:Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Tabel 2 menginformasikan bahwa nilai *whistleblowing system* berada pada minimum 2 hingga maximum 5, rata-rata 16,78, standar deviasi 1,845. Variabel *good government governance* berada pada minimum 1 dan maksimum 5, rata-rata 17,78, standar deviasi 2,196. pengendalian internal berada pada minimum 1 hingga maximum 5, rata-rata 19,53, standar deviasi 2,079. Sedangkan untuk kecurangan dalam pengelolaan dana desa, nilai terendah 1 dan tertinggi 5, rata-rata 20,13, standar deviasi 1,862.

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	keputusan
<i>Whistleblowing system</i>	X1.1	0,627	0,349	Valid
	X1.2	0,803	0,349	Valid
	X1.3	0,714	0,349	Valid
	X1.4	0,654	0,349	Valid
<i>Good government governance</i>	X2.1	0,794	0,349	Valid
	X2.2	0,820	0,349	Valid
	X2.3	0,835	0,349	Valid
	X2.4	0,686	0,349	Valid
pengendalian internal	X3.1	0,620	0,349	Valid
	X3.2	0,617	0,349	Valid
	X3.3	0,671	0,349	Valid
	X3.4	0,524	0,349	Valid
Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	keputusan
	X3.5	0,628	0,349	Valid
kecurangan pengelolaan dana desa	Y.1	0,500	0,349	Valid
	Y.2	0,538	0,349	Valid
	Y.3	0,557	0,349	Valid
	Y.4	0,483	0,349	Valid
	Y.5	0,446	0,349	Valid

Sumber:Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Data yang tercantum di Tabel 3, nilai *r* hitung pada masing-masing variabel bebas menunjukkan perolehan yang lebih tinggi dibanding nilai *r* tabel. Ini menandakan bahwa semua indikator pada ketiga variabel menunjukkan bahwa dapat digunakan secara efektif untuk mengukur dan meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

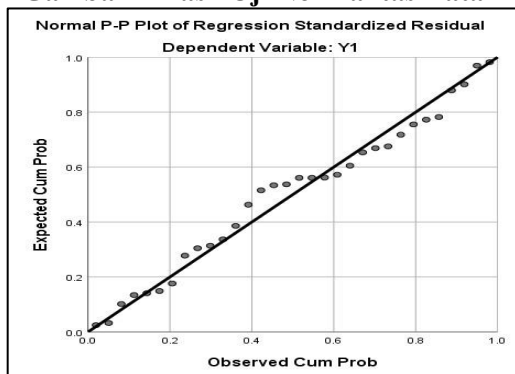
**Tabel 4 Hasil Uji Realibilitas**

No	Variabel	Cronbach's alpha	keterangan
1	Whistleblowing System	0,656	Reliabel
2	Good government governance	0,774	Reliabel
3	Pengendalian Internal	0,693	Reliabel
4	Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	0,620	Reliabel

Sumber:Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Pengujian yang tercantum di Tabel 4 mengindikasikan bahwa setiap variabel memiliki *Cronbach's Alpha* di atas 0,60, artinya instrumen yang dipakai tergolong reliabel. Dengan hasil pengujian kualitas data ini, semua item pernyataan instrumen dinyatakan konsisten dan data yang dihasilkan layak digunakan pada analisis selanjutnya.

**Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Data**



Sumber:Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

*P-P Plot* yang ditampilkan pada pola penyebaran titik data yang mengikuti garis diagonal, mengindikasikan bahwa

residual dalam model ini telah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collineari Statistics <sup>y</sup>		
		Tolerance	VIF
1	Constant)		
	X1	,885	1,130
	X2	,910	1,099
	X3	,854	1,171

a. Dependent Variable: Y1

Sumber:Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Dari Tabel 5 nilai tolerance *whistleblowing system* adalah 0,885 dengan VIF 1,130. Variabel *good government governance* memiliki tolerance sebesar 0,910 dan VIF 1,099, sementara variabel pengendalian internal menunjukkan tolerance 0,854 dan VIF 1,171. Kesimpulannya, penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas.

**Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi**

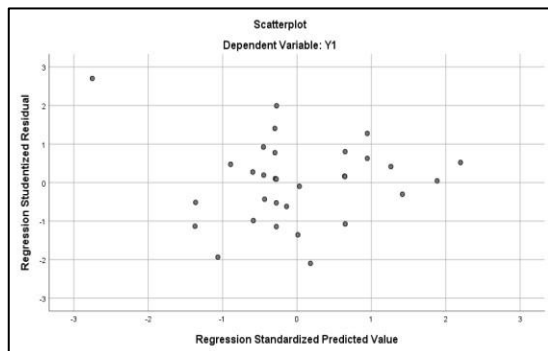
Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 <sup>a</sup>	.801	.780	.504	1.725

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  
b. Dependent Variable: Y1

Sumber:Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Perolehan DW pada tabel 4 berada pada antara -2 sampai 2, sebagaimana dapat disimpulkan dari data yang tersedia, yang mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi selama periode yang diamat dengan periode sebelumnya.

**Gambar 2 Grafik Scatterplot**



Sumber: Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Titik-titik data pada *scatter plot* tersebar di sekitar Pola sebaran data random dan tersebar secara simetris di sekitar garis nol pada sumbu Y menunjukkan model layak dan sesuai terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 7 Hasil Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.701	3	13.567	5.687	.004 <sup>b</sup>
	Residual	66.799	28	2.386		
	Total	107.500	31			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, WBS

Sumber: Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Dalam pengujian yang ditampilkan pada tabel, nilai F hitung sebesar 5,687 dan p *value* sebesar 0,004. Nilai F tabel dengan derajat kebebasan (df) 3;28 adalah 2,95. Karena F hitung melebihi F tabel dan p value berada di bawah ambang signifikansi 0,05, maka Hasil analisis memperlihatkan bahwa ketiga variabel bebas, yaitu *whistleblowing system*, *good government governance*, dan pengendalian internal, menunjukkan kontribusi signifikan secara bersama

terhadap variabel terikat, maka hipotesis H1 dinyatakan valid.

**Tabel 8 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.811	3.433		4.023	.000
	X1	-.376	.154	-.385	-2.440	.021
	X2	.319	.132	.376	2.409	.023
	X3	.356	.144	.398	2.473	.020

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Tabel 8 memperlihatkan perolehan nilai signifikansi variabel *whistleblowing system* sebesar  $0,021 < 0,05$  dan t hitung  $-2,440 < t$  tabel 2,042 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh parsial variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis H2 diterima.

Tabel 8 memperlihatkan perolehan pada variabel *good government governance*, nilai signifikansi  $0,023 < 0,05$  dan t hitung  $2,409 > t$  tabel 2,042 menunjukkan adanya pengaruh parsial yang signifikan. Maka hipotesis H3 dinyatakan diterima.

Tabel 8 memperlihatkan perolehan dari pengendalian internal yaitu nilai signifikansi  $0,020 < 0,05$  dan t hitung  $2,473 > t$  tabel 2,042, yang berarti berpengaruh parsial terhadap variabel terikat. Dengan demikian, hipotesis H4 diterima.

**Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 <sup>a</sup>	.801	.780	504	1.725
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y1					

Sumber: Data diolah peneliti SPSS 26, (2025)

Nilai R<sup>2</sup> yaitu 0,801 menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang tinggi. Artinya, sebesar 80,1% sebagian besar variasi variabel dapat dipaparkan oleh variabel bebas, sementara 19,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

### Pembahasan

Tabel 7 memperlihatkan hasil bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan arah atau hubungan yang positif. Hal tersebut dilihat nilai F hitung sebesar 5,687 dan p value sebesar 0,004. Nilai F tabel dengan derajat kebebasan (df) 3;28 adalah 2,95. Karena F hitung melebihi F tabel dan p value berada di bawah ambang signifikansi 0,05, maka Penelitian ini membuktikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap upaya penurunan tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Ketiga faktor tersebut berfungsi sebagai elemen yang saling terkait dan saling memperkuat guna menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan bersih dari praktik kecurangan.. Sinergi antara ketiga aspek tersebut mampu mendorong terciptanya tata kelola dana desa yang bersih, transparan, serta akuntabel oleh pemerintah desa (Kusuma & Padnyawati, 2022).

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dewi & Padnyawati, (2022),

berpandangan apabila pemerintah desa secara terus-menerus menjalankan WBS, GGG, dan pengendalian internal, potensi *fraud* pengelolaan dana desa dapat dikurangi signifikan. Hal ini akan menciptakan sistem pemerintahan desa yang bersih, transparan, serta mampu menjalankan pengawasan secara optimal.

Mengacu pada teori *fraud triangle*, penerapan pada variabel bebas model tersebut dapat menjadi strategi preventif yang efektif untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Keberadaan sistem pelaporan yang kredibel memperkecil peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan tindakan curang. Di saat yang sama, penerapan prinsip GGG yang baik dan pengawasan internal yang optimal menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap upaya penurunan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, selaras dengan penelitian (Kuswati, 2023), yang menyatakan bahwa sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan dalam penurunan tindakan kecurangan.

Saat ini, pengembangan sistem *whistleblowing* yang efektif menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong tindakan preventif terhadap kecurangan dana desa. Sistem ini memberikan saluran pelaporan yang memungkinkan masyarakat atau aparat desa melaporkan indikasi pelanggaran kepada pihak yang berwenang (Biduri et al., 2022). Implementasi *whistleblowing system* yang baik turut mendukung terbangunnya pengelolaan dana desa yang lebih transparan serta akuntabel.. Dengan demikian, ruang gerak untuk melakukan kecurangan dapat diminimalkan. Sesuai konsep *fraud triangle*, di mana faktor utama terjadinya tindakan *fraud* yaitu adanya kesempatan, dan keberadaan sistem pelaporan menjadi alat untuk menutup

celah tersebut (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Hasil pada Tabel 8 menunjukkan bahwa penerapan *good government governance* secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penurunan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Livia et al., 2024), yang menyimpulkan GGG berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan *good government governance* secara optimal memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Mempura. Ketika prinsip-prinsip tata kelola dijalankan secara konsisten, instansi pemerintah desa akan berkembang dengan lebih sehat dan mampu menghindari praktik *fraud*. Unsur pengawasan yang melekat dalam konsep *governance* turut memperkuat sistem deteksi dini terhadap tindakan penyimpangan (Silvia, 2022).

Teori *fraud triangle* mengidentifikasi tiga penyebab utama terjadinya kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Dalam hal ini, variabel *good government governance* dapat menjadi alat pencegahan yang efektif, sebab pengelolaan dana desa yang akuntabel akan menumbuhkan budaya *self-assessment* pada aparatur desa. Proses ini mencakup evaluasi terhadap kinerja, sikap, dan kepribadian yang turut memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya *fraud* di Kecamatan Mempura (Wahyuni & Hayati, 2022).

Hasil pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap upaya penurunan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, selaras dengan (Anis et al, 2023), yang menyimpulkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal berperan krusial dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Mempura.

Pengendalian internal yang baik berfungsi untuk memastikan bahwa dana dikelola secara transparan, digunakan sesuai sasaran, serta dicatat dan dilaporkan secara tepat dan akuntabel (Karolina et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal akan mengurangi atau menghilangkan godaan dan insentif yang mempengaruhi kecurangan seperti adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang mungkin menyebabkan pekerja berperilaku tidak etis, ilegal, atau tidak jujur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bersumber pada hasil telaah pada pembahasan hasil penelitian tersebut, oleh karena itu berikut ini kesimpulan yang dapat dibuat:

1. Variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.
2. Sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
3. *Good government governance* juga terbukti berkontribusi secara signifikan dalam variabel dependen.
4. Pengendalian internal terbukti berkontribusi secara signifikan dalam variabel dependen. Berdasarkan hasil ini diharapkan:
  1. Masyarakat desa sebagai emiten dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan diskusi untuk meningkatkan penerapan model variabel bebas tersebut dalam pemerintahan desa.
  2. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun serta melaporkan laporan keuangan pemerintahan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ari Bramasto, Sri Dewi Anggadini, U. H. N. N. A. (2022). Pencegahan Kecurangan Dengan Audit Internal. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 64–82. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/aku>  
<https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/516>  
<https://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/516/365>
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner*, 6(4), 4021–4036. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2798–8961, 334–344.
- Dewi Silvia, A. S. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3479>
- Erika Karolina, P., Ladewi, Y., Gantino, R., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Palembang, U., & Rilla Gantino, P. (2023). SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Pengendalian Intern Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1).
- Evia Lestari, I. A. M., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1803>
- Febiola, F., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi: Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 332–346. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.888>
- Geondart, J., Kamilah, F., & Putri, G. E. (2023). Pengaruh Alokasi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru. *JALAK: Jurnal Akuntansi Lancang Kuning*, 1(1), 11–16.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- i Kadek Anis Santika Dewi, Ni Komang Sumadi, N. P. A. K. (2023). e-ISSN 2798-8961 Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Januari 2023. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 44–56.
- Kusuma Dewi, N. L. G., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344.

- <https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3479>
- Kuswati, E. W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 66–76.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i.7>
- Livia, A. F., Nursalma, N., & Meita, S. S. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 45, 5(1), 44–55.
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36.  
<https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Nadila, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Rahayu, S. S. (2024). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6, 1880–1891.  
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5815>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryowati, E. (2024). *Kejati Riau Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Burung Jauhari di Siak*. JawaPos.  
<https://www.jawapos.com/berita-sekitaranda/015236809/kejati-riau-selidikidugaan-korupsi-pembangunan-tamanburung-jauhari-di-siak>
- Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). Analisis good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system dan fraud. *Journal of Business and Banking*, 12(1), 125.  
<https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). *Pengaruh Whistleblowing System , Internal Control , Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention*. 11(2), 233–247.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>